

# **ALOKASI ANGGARAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA 2001-2009**

Beryl Artesian Girsang  
berylgirsang@gmail.com

Tukiran  
tukiran@ugm.ac.id

## **Abstract**

*Human resources enhancement for reaching standard of living well, need to have place in development plan. Government's support is needed through regional development budget. So, this research intended to see the impact of regional budget to human development's value in North Sumatera.*

*Data that used is regional government budget for education, health, and economy sector from APBD. The large number of budget analyzed to each human development index value's accomplishment, two years after.*

*Based from the result can be concluded that large of budget has no effect directly to each HDI dimension's growth in North Sumatera. Large budget couldn't guarantee the index value's growth. Otherwise, the low budget couldn't guarantee the index value's accomplishment was low too. Some region in North Sumatera have grew their HDI value, although their budget was decrease. On the other side, low budget can generate growth and high accomplishment of their HDI dimension value.*

*Keywords : Human Development, HDI, Regional Government Budget.*

## **Abstrak**

*Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia untuk mencapai taraf hidup sejahtera perlu mendapat tempat dalam perencanaan pembangunan. Dukungan dibutuhkan dari pihak pemerintah melalui belanja pembangunan APBD. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh anggaran daerah terhadap tingkat pembangunan manusia yang ada di Provinsi Sumatera Utara.*

*Data anggaran yang digunakan adalah belanja pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi APBD. Besar anggaran dianalisis terhadap pencapaian nilai masing-masing indeks pembangunan manusia dua tahun setelahnya.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa besarnya anggaran tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan masing-masing nilai indeks dimensi dari IPM di Propinsi Sumatera Utara. Anggaran yang besar tidak menjamin peningkatan nilai indeks yang ada. Hal sebaliknya jika anggaran rendah juga tidak menjamin pencapaian indeksnya kecil. Beberapa daerah di Sumatera Utara memiliki peningkatan nilai IPM meskipun anggaran menurun. Di satu sisi, anggaran yang kecil juga dapat menghasilkan pertumbuhan dan pencapaian nilai dimensi IPM yang tinggi.*

*Kata Kunci : Pembangunan Manusia, IPM, Anggaran Daerah.*

## PENDAHULUAN

Di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang senantiasa memperhatikan pembangunan dalam negaranya. Unsur pembangunan yang mendukung kemajuan dari sebuah negara diantaranya adalah sumberdaya manusia. Jika suatu negara yang kaya akan sumberdaya alam tetapi minim sumberdaya manusia, maka akan sulit untuk memajukan negaranya. Tetapi sumberdaya manusia yang baik tentunya akan dapat mengelola kekayaan yang dimiliki suatu negara dengan baik pula.

Konsep pembangunan manusia dapat diukur tingkatannya supaya dapat diterjemahkan dalam bentuk pembuatan kebijakan pembangunan. Salah satu ukuran pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia mengukur tingkat pencapaian secara keseluruhan di suatu negara menurut tiga dimensi pokok pembangunan, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tujuan pembangunan manusia adalah menciptakan suatu lingkungan bagi manusia agar dapat menikmati hidup yang lama, sehat, dan kreatif (UNDP, 2003).

Dalam perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah pastinya memerlukan dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran di sektor-sektor yang menunjang pembangunan manusia, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam perjalanannya, saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri. Hal tersebut dimulai sejak terjadinya desentralisasi keuangan melalui otonomi daerah yang dimulai sejak 2001. Otonomi daerah mulai ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 34/2004.

Jika diingat pada masa pemerintahan orde baru, kepengurusan menyangkut pemerintahan dan keuangan masih terpusat. Sejak otonomi daerah itulah desentralisasi kepengurusan daerah terjadi. Menurut Mardiasmo (2002), secara teoritis desentralisasi akan menghasilkan dua manfaat nyata, antara lain (1) Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. (2) Memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Desentralisasi keuangan yang diberikan pemerintah tentunya memberi ruang untuk pemerintah dapat lebih bijak mengalokasikan dana anggaran daerah untuk keperluan pembangunan manusia di daerahnya masing-masing. Perbedaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, bahkan kultur yang dimiliki tiap daerah tentunya memerlukan penanganan yang berbeda. Sehingga dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing provinsi, tujuan pembangunan manusia melalui anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dapat tercapai.

Dana Anggaran Belanja Pembangunan pada APBD Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor-sektor penunjang pembangunan manusia seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga turut mengalami peningkatan anggaran. Sejalan dengan terus meningkatnya jumlah anggaran belanja ketiga sektor tersebut, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara juga terus mengalami peningkatan. Sejak perhitungan pertama IPM setelah otonomi daerah, yakni pada 2002 yang nilai IPM

hanya sebesar 66,6 persen, terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2009 mencapai angka 73,8 persen.

Jika dilihat berdasarkan pencapaian IPM Provinsi Sumatera Utara, maka secara umum dapat dikatakan peningkatannya sejalan dengan peningkatan anggaran belanja pembangunan. Peningkatan yang terjadi pada tingkat Provinsi Sumatera Utara pastinya terbentuk dari pencapaian IPM kabupaten/kota. Sektor pendukung dimensi IPM yang terkandung dalam anggaran belanja pembangunan seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, tentunya juga memegang peranan. Kebutuhan yang berbeda pada tiap daerah kabupaten/kota juga membuat perbedaan pengalokasian anggaran dan tentunya juga berimbas pada pencapaian IPM. Berdasarkan kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, yakni:

1. Bagaimana alokasi anggaran daerah dalam pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2009?

## METODE PENELITIAN

### Sumber Data

Sumber data penelitian diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan dan telah dipublikasikan oleh instansi-instansi secara lengkap dan akurat. Data sekunder yang digunakan antara lain data IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang berasal dari Laporan Pembangunan Manusia terbitan BPS, BAPPENAS, dan UNDP tahun 2002, 2004, 2006, 2008, dan 2009.

Untuk data alokasi anggaran daerah sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digunakan data dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2001-2003 terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, serta publikasi realisasi anggaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data yang digunakan merupakan realisasi belanja pembangunan menurut sektor. Untuk sektor ekonomi

mencakup beberapa sektor seperti industri; pertanian & kehutanan; perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan daerah, & koperasi; transportasi; dan pertambangan & energi, yang kesemuanya merupakan data tingkat kabupaten/kota.

Data alokasi anggaran daerah sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dikumpulkan pada tahun 2001, 2003, dan 2007. Pemilihan titik awal tahun 2001 dikarenakan pada tahun tersebutlah otonomi daerah mulai diberlakukan. Untuk data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikumpulkan berdasarkan tiga titik tahun yaitu 2004, 2005, dan 2009.

Perbedaan pemilihan titik tahun dikarenakan anggaran daerah sendiri baru dapat direalisasikan pada bulan April setiap tahunnya. Sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia sudah dicatatkan sejak awal tahun. Sehingga, pengaruh hasil dari alokasi anggaran baru dapat terlihat pada tahun-tahun setelahnya.

### Pengolahan Data

Untuk nilai masing-masing dimensi IPM yang dipublikasikan dalam laporan tahunan masih berupa data mentah. Masing-masing indikatornya memiliki satuan, seperti Angka Harapan Hidup (tahun), Rata-rata Lama Sekolah (tahun), Angka Melek Huruf (persen), dan Pendapatan per Kapita (rupiah). Untuk memudahkan dalam analisis, penyamaan satuan semua dimensi dalam IPM dapat dilakukan dengan menggunakan standar deprivasi maksimum dan minimum dari X1, X2, dan X3. Rumusnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Standar Deprivasi Maksimum dan Minimum**

Komponen	Maksimum	Minimum
X1	85	25 (UNDP)
X2	15	0 (UNDP)
X3	737,72	300/360 (UNDP, PBB Per Kapita Disesuaikan)

Contoh :

Perhitungan IPM Provinsi Sumatera Utara 2009.

$$X_1 = 69,35 \text{ tahun}$$

$$X_2 = 8,65 \text{ tahun, dan } 97,15 \text{ persen}$$

$$X_3 = 634,7 \text{ (ribuan rupiah)}$$

Indeks Harapan Hidup =

$$(69,35-25) / (85-25) = 0,739 = 73,9 \%$$

Indeks Melek Huruf =

$$(97,15-0) / (100-0) = 0,9715 = 97,15 \%$$

Indeks Lama Sekolah =

$$(8,65-0) / (15-0) = 0,577 = 57,7 \%$$

Indeks Pendidikan =

$$(2/3 \times 97,15) / (1/3 \times 57,7) = 84 \%$$

Indeks Pendapatan =

$$(634,7-360)/(737,72-300) = 0,628 = 62,8 \%$$

Indeks Pembangunan Manusia =

$$(73,9\% + 84\% + 62,8\%) / 3 = 73,6 \%$$

### Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang dianalisis mencakup segala informasi mengenai besaran dan perkembangan alokasi anggaran daerah sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap indikator penyusun IPM yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.

Anggaran yang digunakan lebih dahulu dibagi per jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota, sehingga dapat terlihat variasi kependudukan yang tentunya berpengaruh terhadap besarnya anggaran. Masing-masing nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kemudian diurutkan menurut pencapaian nilainya melalui pertumbuhan yang terjadi selama waktu 2 atau 3 tahun setelah anggaran dialokasikan. Kemudian dari pertumbuhan dan pencapaian nilai IPM yang ada dilihat berhasil atau tidaknya pembangunan manusia pada kabupaten/kota, mengacu dari besarnya anggaran yang dialokasikan pada tahun-tahun sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Anggaran Sektor Pendidikan Dalam Perkembangan Indeks Pendidikan IPM

Pada tahun 2001 mayoritas nilai indeks pendidikan masih dikategorikan mengengah atas. Untuk pencapaian nilai indeks pendidikan IPM tertinggi pada tahun 2004 adalah Kota Pematangsiantar, dan Kota Medan. Kedua kota ini mencapai angka masing-masing 89,7 dan 89,6 persen.

Kabupaten Karo yang menganggarkan dana terkecil di Sumatera Utara mampu memperoleh hasil yang baik. Dengan alokasi anggaran hanya sebesar 149,9 juta, atau 520,5 per penduduk, Kabupaten Karo mampu mengalami pertumbuhan sebesar 2,8 persen dan mencapai nilai indeks pendidikan sebesar 84 persen pada tahun 2004.

**Tabel 2. Anggaran Sektor Pendidikan Tahun 2001 dengan Pertumbuhan Indeks Pendidikan IPM 1999 ke 2004**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran per Penduduk	Indeks Pendidikan	
			1999	2004
1	Pematangsiantar	4110.41	86.7	89.7
2	Medan	2213.36	87.9	89.6
3	Tebingtinggi	20350.37	85	86.6
4	Binjai	12823.13	84.6	86.4
5	Toba Samosir	10290.83	-	86
6	Tapanuli Selatan	6197.23	83.3	85.5
7	Tapanuli Utara	14169.70	82.4	84.7
8	Tanjungbalai	17143.77	82	84.2
9	Karo	520.75	81.2	84
10	Deli Serdang	3643.33	79.8	83.6
11	Labuhan Batu	11180.27	80.6	83.3
12	Langkat	3923.23	81.9	83.2
13	Simalungun	2960.32	78.2	82.5
14	Dairi	11892.27	81.4	81.8
15	Mandailing Natal	12303.56	-	81.6
16	Tapanuli Tengah	5158.01	77.9	80.9
17	Asahan	9828.83	77.8	78.4
18	Nias	29771.77	69.8	70.7

Sumber : BPS

Keterangan : ( - ) Daerah belum mengalami pemekaran

Kabupaten Nias yang pada tahun 2001 menganggarkan dana terbesar di

Propinsi Sumatera Utara, nilainya meningkat menjadi 70,7 persen. Peningkatan yang hanya sebesar 0,9 persen tetap membuat pencapaian nilai IPM nya terendah. Besaran anggaran yang dialokasikan Kabupaten Nias tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan nilai indeks pendidikan IPM nya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun anggaran 2003 Kota Sibolga mengalokasikan anggaran per penduduk terbesar se-Sumatera Utara. Namun dengan anggaran yang sebesar 79.869.88 per penduduk, Kota Sibolga malah mengalami penurunan nilai indeks pendidikan sebesar 0,2 persen. Meski terjadi penurunan nilai indeks, namun pencapaian indeks pendidikan IPM nya tergolong tinggi.

**Tabel 3. Anggaran Sektor Pendidikan Tahun 2003 dengan Pertumbuhan Indeks Pendidikan IPM 2002 ke 2005**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran per Penduduk	Indeks Pendidikan	
			2002	2005
1	Pematangsiantar	15649.35	88.7	90.3
2	Medan	16324.51	89.4	89.8
3	Sibolga	79869.88	87.4	87.2
4	Tebingtinggi	53325.55	85.5	87.2
5	Binjai	40656.78	86.5	86.9
6	Toba Samosir	29571.48	84.4	86.1
7	Tapanuli Selatan	17767.37	85.4	86.1
8	Tapanuli Utara	62863.38	83.2	85.3
9	Tanjungbalai	68605.31	82.9	85
10	Karo	11367.45	82.8	84.6
11	Deli Serdang	8631.28	81.8	84.4
12	Langkat	12595.16	83.2	83.9
13	Labuhan Batu	12292.70	80.9	83.5
14	Simalungun	22567.28	82	83.2
15	Mandailing Natal	39118.51	79.4	82.3
16	Dairi	30006.09	82.1	82.1
17	Tapanuli Tengah	18553.26	80	81.5
18	Asahan	12645.81	78.1	78.8
19	Nias	29939.99	67.9	71.8

Sumber : BPS

Untuk pencapaian nilai indeks pendidikan tertinggi pada tahun 2005 dipegang Kota Pematangsiantar sebesar 90,3 persen. Dari segi anggaran memang

Pematangsiantar bukan yang paling besar jumlahnya, namun pencapaian nilainya tetap tinggi. Bahkan nilainya mampu mengalahkan Kota Sibolga sebagai pengalokasi anggaran pendidikan terbesar.

Pertumbuhan yang dibarengi pencapaian indeks pendidikan yang cukup tinggi terjadi di Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten yang tergolong daerah baru dimekarkan malah mengalami pertumbuhan 2,9 persen dan indeks pendidikan IPM nya mencapai angka 82,3 persen. Memang pencapaiannya belum dapat mengalahkan daerah kota seperti Pematangsiantar, Medan, dan Sibolga, namun untuk sebuah daerah hasil pemekaran pencapaian terbilang cukup baik.

Pada tahun anggaran 2007 alokasi anggaran pembangunan sektor pendidikan meningkat pesat. Hal ini juga dipengaruhi adanya perturan pemerintah yang mengharuskan alokasi anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20 persen. Oleh karena itu dana yang dianggarkan meningkat pesat bahkan mencapai 1.075.556.47 per penduduk yang dialokasikan Kabupaten Pakpak Barat. Kabupaten Pakpak Barat merupakan daerah hasil pemekaran yang mengalokasikan dana per penduduknya cukup tinggi. Kota Medan sebenarnya merupakan pengalokasi anggaran terbesar secara umum, namun jumlah penduduknya yang besar menyebabkan alokasi dana per individu pun lebih kecil dibandingkan Pakpak Barat yang hanya memiliki jumlah penduduk sebesar 38.726 jiwa.

Kabupaten Nias sejak 2001-2009 menempati peringkat terbawah dalam pencapaian nilai indeks pendidikan IPM nya. Pada periode tersebut ternyata Kabupaten Nias belum mampu mengatasi masalah pendidikannya meskipun alokasi yang terus meningkat dari 2001-2007. Kabupaten Nias Selatan yang merupakan hasil pemekaran juga masih memiliki tugas berat dalam hal peningkatan pendidikannya. Permasalahan sarana yang belum memadai, ditambah kurangnya

kesadaran masyarakat untuk pendidikan juga menjadi masalah yang menghambat pembangunan. Letak geografisnya juga terbilang jauh dari kemajuan pembangunan, disamping itu ketidakmerataan pembangunan yang lebih condong ke pantai Timur Sumatera Utara turut menambah kesulitan bagi pembangunan daerah yang tertinggal seperti Nias.

**Tabel 4. Anggaran Sektor Pendidikan Tahun 2007 dengan Pertumbuhan Indeks Pendidikan IPM 2007 ke 2009**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran per Penduduk	Indeks Pendidikan	
			2007	2009
1	Pematangsiantar	463743.68	90.3	90.3
2	Medan	209948.75	90	90.2
3	Padangsidempuan	566466.09	88.2	88.9
4	Binjai	444645.85	88	88
5	Sibolga	606542.43	87.2	87.6
6	Tebingtinggi	626831.84	87.5	87.5
7	Toba Samosir	726099.98	86.8	87.2
8	Tapanuli Selatan	357099.82	86.3	86.4
9	Karo	452169.80	85.5	86
10	Deli Serdang	217498.46	85.3	85.8
11	Humbang Hasundutan	323758.26	84.7	85.6
12	Samosir	624480.77	85.5	85.5
13	Tanjungbalai	481898.56	85.1	85.5
14	Dairi	451785.85	83.4	84.3
15	Simalungun	391685.74	84	84.2
16	Serdang Bedagai	22000.92	84	84.1
17	Langkat	285292.98	83.9	83.9
18	Labuhan Batu	281105.26	84	83.8
19	Mandailing Natal	331547.69	83.3	83.3
20	Pakpak Bharat	1075556.47	82.3	82.4
21	Tapanuli Tengah	403704.21	81.7	81.9
22	Asahan	404042.24	80.7	81.6
23	Nias	347254.99	73.9	74.1
24	Nias Selatan	262991.65	70.5	70.8

Sumber : BPS & Kementerian Keuangan

### Anggaran Sektor Kesehatan Dalam Perkembangan Indeks Kesehatan IPM

Untuk sektor kesehatan, anggaran yang besar cukup memberi pengaruh pada pertumbuhan indeks kesehatannya. Terbukti dari beberapa kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran terbesar, rata-rata mengalami pertumbuhan indeks

kesehatan yang lumayan besar bila dibandingkan daerah lainnya. Namun, pertumbuhan tersebut tidak semuanya diikuti dengan capaian nilai indeks kesehatan yang tinggi.

Jika anggaran besar memberi dampak pada pertumbuhan indeks kesehatan beberapa daerah, berbeda dengan Kota Pematangsiantar dan Kota Medan. Kedua daerah tersebut mengalokasikan anggaran terkecil se Sumatera Utara. Meskipun anggarannya kecil, namun tetap mengalami pertumbuhan indeks harapan hidup sebesar 1,5 persen, dan 1,1 persen. Bahkan untuk pencapaian nilai indeks kesehatannya, Kota Pematangsiantar mencapai angka 76,7 persen pada 2004. Pencapaian tersebut merupakan nilai indeks kesehatan terbesar kedua setelah Kota Tebingtinggi sebesar 76,8 persen.

**Tabel 5. Anggaran Sektor Kesehatan Tahun 2001 dengan Pertumbuhan Indeks Kesehatan IPM 1999 ke 2004**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran per Penduduk	Indeks Kesehatan	
			1999	2004
1	Tebingtinggi	17881.09	74.2	76.8
2	Pematangsiantar	2239.90	75.2	76.7
3	Binjai	11626.12	73.5	75.2
4	Karo	7453.73	76	75.2
5	Medan	1572.29	73.7	74.8
6	Toba Samosir	8082.92	-	73.2
7	Langkat	3363.06	73	72
8	Tanjungbalai	9864.90	69.8	71.8
9	Deli Serdang	4338.08	68.3	71.7
10	Nias	10055.66	69	71.5
11	Asahan	2616.02	69.8	71.2
12	Simalungun	3706.62	70.3	70.8
13	Tapanuli Utara	10216.44	67	69.8
14	Tapanuli Tengah	3100.78	67.5	69.7
15	Tapanuli Selatan	12844.57	65.8	69
16	Dairi	5942.58	67.3	68.7
17	Labuhan Batu	2986.04	67.5	68.5
18	Mandailing Natal	7238.04	-	62.5

Sumber : BPS

Keterangan : ( - ) Daerah belum mengalami pemekaran

Untuk daerah yang memiliki pencapaian indeks kesehatan terendah di

tahun 2005 adalah Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang nilai indeks kesehatannya juga termasuk yang paling rendah di Sumatera Utara. Mayoritas daerah yang mencapai nilai rendah adalah daerah kabupaten, sedangkan daerah kota pencapaian nilainya termasuk yang tertinggi di Sumatera Utara, seperti Kota Medan dan Pematang Siantar. Secara umum, efek anggaran tahun 2003 memberi dampak baik bagi pertumbuhan nilai indeks kesehatan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Tidak ada kabupaten/kota yang mengalami penurunan nilai indeks kesehatan, namun memang anggaran yang besar tidak mempengaruhi pencapaian nilai yang besar untuk indeks kesehatan.

**Tabel 6. Anggaran Sektor Kesehatan Tahun 2003 dengan Pertumbuhan Indeks Kesehatan IPM 2002 ke 2005**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran per Penduduk	Indeks Kesehatan	
			2002	2005
1	Karo	8807.05	76.7	77.8
2	Pematangsiantar	13099.16	76.5	77.3
3	Medan	14936.51	74	76.2
4	Binjai	16008.01	74	75.8
5	Tebingtinggi	45246.54	75	75.5
6	Toba Samosir	15329.96	69.8	74.7
7	Sibolga	28807.53	72.7	73.7
8	Deli Serdang	6556.27	68.8	73.2
9	Langkat	5685.04	70.2	73
10	Nias	15114.12	69.7	72.8
11	Tanjungbalai	22197.75	70.3	72.7
12	Simalungun	6493.69	70.7	72.3
13	Asahan	2234.91	70.3	71.7
14	Tapanuli Utara	37500.31	67.3	70.7
15	Tapanuli Tengah	12546.63	67.7	70
16	Dairi	19316.42	68.2	69.7
17	Labuhan Batu	5079.77	68.2	69.7
18	Tapanuli Selatan	11738.79	67	69.3
19	Mandailing Natal	18133.12	61.7	63.3

Sumber : BPS

Pada tahun anggaran 2007, besaran alokasi anggaran meningkat pesat seperti pada anggaran pendidikan sebelumnya.

Secara keseluruhan, pencapaian nilai indeks kesehatan kabupaten/kota di Sumatera Utara juga tergolong tinggi. Nilai indeks kesehatan tertinggi dipegang oleh Kabupaten Toba Samosir dan Kota Sibolga masing-masing sebesar 78,5 dan 78,3 persen. Untuk alokasi anggarannya Kabupaten Pakpak Barat menjadi yang paling besar se Sumatera utara. Peningkatan pesat jumlah anggaran juga memacu pertumbuhan indeks kesehatan sebesar 0,2 persen. Pada sektor kesehatan, besarnya anggaran terlihat cukup memberi pengaruh pada pencapaian nilai indeks kesehatan di Sumatera Utara.

**Tabel 7. Anggaran Sektor Kesehatan Tahun 2007 dengan Pertumbuhan Indeks Kesehatan IPM 2007 ke 2009**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran per Penduduk	Indeks Kesehatan	
			2007	2009
1	Toba Samosir	305311.90	78.1	78.5
2	Sibolga	317658.54	77.9	78.3
3	Medan	103764.19	77.3	77.9
4	Padangsidempuan	172298.68	77.5	77.8
5	Tapanuli Tengah	90902.26	76.6	77
6	Binjai	169574.95	75.9	76
7	Deli Serdang	58839.54	74.7	75.6
8	Humbang Hasundutan	130235.25	75.2	75.3
9	Serdang Bedagai	42847.72	73.9	75.1
10	Tebingtinggi	198272.71	74.1	74.4
11	Tanjungbalai	162200.19	73.1	74.3
12	Mandailing Natal	68378.07	73.6	74.1
13	Nias	107145.44	73.3	74
14	Asahan	93488.82	71.9	73.7
15	Langkat	65544.17	73.2	73.4
16	Samosir	21843.68	72.9	73.2
17	Tapanuli Selatan	112411.19	72.8	73.1
18	Simalungun	70661.65	72.7	73.1
19	Dairi	153828.41	71.2	71.9
20	Pematangsiantar	179838.30	70.9	71.5
21	Pakpak Bharat	373031.04	71.1	71.3
22	Labuhan Batu	7600.39	69.7	70.5
23	Karo	161688.03	69.9	70.1
24	Nias Selatan	173546.76	64.1	64.2

Sumber : BPS & Kementerian Keuangan

Pencapaian nilai terendah untuk indeks kesehatan masih dipegang Kedua daerah tersebut tergolong daerah tertinggal

di Sumatera Utara. Masalah terbesar yang dihadapinya adalah pendidikan dan kesehatan. Namun, masalah kesehatannya jauh lebih memprihatinkan.

Kasus gizi buruk dan kematian ibu saat melahirkan di Pulau Nias juga tergolong tinggi. Masyarakatnya yang masih banyak tergolong miskin membuat sulit untuk mengakses layanan kesehatan, terutama di daerah pedalaman. Orang-orang yang tergolong mampu di Pulau Nias hanya terpusat di kota. Sebaliknya masyarakat yang berada di pedalaman sangat sulit untuk menerima pelayanan kesehatan, ditambah lagi kurangnya tenaga medis berkualitas.

### Anggaran Sektor Ekonomi Dalam Perkembangan Indeks Ekonomi IPM

Setelah otonomi daerah, penganggaran yang berlangsung pada tahun 2001 memberi pengaruh pada pertumbuhan indeks ekonomi yang cukup tinggi. Contohnya Kabupaten Nias yang memiliki pertumbuhan indeks ekonomi sebesar 40,1 persen.

**Tabel 8. Anggaran Sektor Ekonomi Tahun 2001 dengan Pertumbuhan Indeks Ekonomi IPM 1999 ke 2004**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran per Rumah Tangga	Indeks Ekonomi	
			1999	2004
1	Toba Samosir	312592.99	-	61.7
2	Binjai	319988.86	46.9	59.6
3	Tebingtinggi	150087.33	48.7	59.5
4	Labuhan Batu	110577.64	43.6	59.2
5	Pematangsiantar	84028.51	50.2	59.2
6	Medan	102795.03	50.2	59.1
7	Deli Serdang	49002.05	49.8	58.9
8	Asahan	139492.92	47.4	58.8
9	Dairi	179761.81	34.2	58.6
10	Mandailing Natal	407599.56	-	57.8
11	Tapanuli Selatan	155883.10	46.1	57.8
12	Sibolga	3325.38	48.7	57.7
13	Tapanuli Utara	535520.31	47.3	57.6
14	Simalungun	250264.99	46.4	57.4
15	Karo	145622.70	49.4	57.1
16	Langkat	126579.54	46	56.3
17	Tanjungbalai	144073.89	48	56.2
18	Tapanuli Tengah	362609.50	40.6	53.9
19	Nias	326043.29	12.3	52.4

Sumber : BPS

Keterangan : (-) Daerah belum mengalami pemekaran

Nilai tersebut sangat tinggi jika dibandingkan pertumbuhan daerah lainnya. Meskipun pencapaian yang terjadi masih menjadi yang paling rendah di Sumatera Utara, namun Nias berhasil meningkatkan nilai indeks ekonomi yang pada tahun sebelum otonomi daerah tergolong sangat rendah.

Tahun anggaran 2003 terlihat sedikit berbeda karena beberapa daerah malah menurunkan anggaran sektor ekonomi, diantaranya adalah Kabupaten Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal. Namun yang terjadi justru berbanding terbalik dengan perolehan indeks ekonominya. Penurunan anggaran malah membuat kedua Kabupaten tersebut mengalami pertumbuhan indeks ekonomi, bahkan memiliki pertumbuhan tertinggi di Sumatera Utara.

**Tabel 9. Anggaran Sektor Ekonomi Tahun 2003 dengan Pertumbuhan Indeks Ekonomi IPM 2002 ke 2005**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran per Rumah Tangga	Indeks Ekonomi	
			2002	2005
1	Toba Samosir	437390.82	53.6	62
2	Tapanuli Selatan	303168.99	51.9	60.4
3	Mandailing Natal	389596.03	49.3	60.2
4	Binjai	382266.05	53.6	59.9
5	Tebingtinggi	203987.47	53.8	59.6
6	Tapanuli Utara	665221.75	50.8	59.5
7	Labuhan Batu	238603.45	52.4	59.5
8	Medan	133339.66	56.3	59.3
9	Pematangsiantar	265229.47	56.4	59.2
10	Deli Serdang	162560.31	53.7	59.1
11	Dairi	426547.33	50.8	59
12	Asahan	247591.23	52	59
13	Langkat	285353.13	51.1	58.7
14	Padangsidempuan	252611.96	-	58.3
15	Sibolga	723955.95	51.4	58.1
16	Simalungun	412479.97	51.7	57.6
17	Karo	437597.17	50.9	57.1
18	Tanjungbalai	749846.24	49.5	56.4
19	Tapanuli Tengah	1039058.4	49.2	54.6
20	Nias	653295.80	47.2	52.9

Sumber : BPS

Pencapaian nilai indeks ekonomi terbesar tahun 2005 adalah Kabupaten

Tapanuli Selatan yang nilainya mencapai 60,4 persen. Komoditas perekonomian sektor pertanian masih menjadi penunjang perekonomian rakyat. Sehingga alokasi anggaran yang ada di daerah tersebut bertumpu pada sektor pertanian. Jika melihat dari segi pengalokasi anggaran terbesar, pencapaian yang diperoleh Kabupaten Tapanuli Tengah hanya sebesar 5,4 persen dan nilai indeks sebesar 54,6 persen. Pencapaian nilai tersebut tidak lebih baik dari Kota Medan yang mengalokasikan dana paling rendah pada tahun 2003.

Pada sektor kesehatan, dan pendidikan Kabupaten Pakpak Barat mengalokasikan anggaran per penduduk yang tertinggi di Sumatera Utara. Begitu juga halnya dengan sektor ekonomi. Namun pencapaian nilai indeks ekonominya hanya mampu mencapai 57,5 persen.

**Tabel 10. Anggaran Sektor Ekonomi Tahun 2007 dengan Pertumbuhan Indeks Ekonomi IPM 2007 ke 2009**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran per Rumah Tangga	Indeks Ekonomi	
			2007	2009
1	Toba Samosir	997565.48	62.6	64.7
2	Tapanuli Selatan	533115.59	62	63.8
3	Tebingtinggi	636620.69	61	63
4	Labuhan Batu	225440.24	61	62.7
5	Mandailing Natal	589201.60	60.5	62.5
6	Pematangsiantar	496820.02	60.7	62.2
7	Medan	181186.91	60.7	62.2
8	Deli Serdang	159315.22	60.5	61.9
9	Binjai	528802.16	60.4	61.8
10	Simalungun	300100.01	59	61.4
11	Asahan	388260.33	59.4	61.1
12	Sibolga	773698.77	58.7	60.9
13	Serdang Bedagai	261299.40	59	60.8
14	Padangsidempuan	308056.71	58.9	60.6
15	Langkat	250067.72	57.7	60.4
16	Dairi	575135.96	59.2	60.3
17	Samosir	995088.06	58.3	59.6
18	Tanjungbalai	599873.16	58.7	59.6
19	Karo	638416.21	57.8	59.4
20	Tapanuli Tengah	539192.29	56.7	58.7
21	Pakpak Bharat	2217559.09	55.7	57.5
22	Humbang Hasundutan	875047.40	56	57.4
23	Nias	886381.30	53.4	56.1
24	Nias Selatan	472605.30	51	53

Sumber : BPS & Kementerian Keuangan

Hal yang sebaliknya terjadi pada Kabupaten Deli Serdang yang mengalokasikan anggaran terkecil pada tahun 2007, tetapi mampu mengalami pencapaian nilai yang lebih besar dari Kabupaten Pakpak Barat, yakni sebesar 61,9 persen.

Pada tahun 2009 keseluruhan kabupaten/kota mengalami pertumbuhan indeks ekonomi, tepat dua tahun setelah alokasi anggaran 2007. Namun sama halnya dengan tahun anggaran 2003, pada tahun anggaran 2007 juga banyak daerah yang mengurangi alokasi anggaran sektor ekonominya. Beberapa diantaranya adalah Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, dan Kota Tanjungbalai. Meskipun daerah-daerah tersebut menurunkan anggaran sektor ekonominya, tetap dapat memberikan pertumbuhan indeks ekonomi

Efek anggaran 2007 tidak sebesar pertumbuhan yang terjadi setelah anggaran tahun 2003. Banyak daerah yang menurunkan anggarannya, tetapi tetap dapat mengalami pertumbuhan indeks ekonominya. Beberapa daerah yang menganggarkan dana sangat besar justru hanya mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar. Disamping itu anggaran yang tidak terlalu besar dapat mengalami pertumbuhan yang lebih besar dari daerah yang menganggarkan dana paling besar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa secara umum besarnya anggaran kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara tidak menjamin langsung pertumbuhan masing-masing nilai indeks dimensi dari IPM akan tinggi. Hal sebaliknya jika anggaran rendah juga tidak menjamin pertumbuhan indeksnya kecil.

Beberapa daerah memiliki anggaran besar seperti Kabupaten Nias dan Nias Selatan, tetapi tidak memiliki pencapaian nilai indeks yang tinggi. Pembangunan manusia pada daerah-daerah tersebut dapat dikatakan tidak berhasil.

Sebaliknya beberapa daerah memiliki pembangunan manusia yang berhasil, karena mencapai nilai indeks pembangunan manusia tinggi.

Tiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga pengalokasian anggaran juga sepatutnya sesuai kebutuhan masing-masing. Disamping itu keberhasilan pembangunan manusia yang ditunjukkan melalui nilai indeks pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dari IPM tidak serta merta dapat dipengaruhi oleh besarnya anggaran.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

UNDP. (2003). *Human Development Report 2003*. New York : UNDP.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2011). *Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010 – Keterkaitan Antara IPM, IPG, dan IDG*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2005). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara 2001-2003*. Medan : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.
- BPS. (2006). *Indeks Pembangunan Manusia 2004-2005*. Jakarta : BPS.
- BPS. (2007). *Indeks Pembangunan Manusia 2005-2006*. Jakarta : BPS.
- BPS. (2008). *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*. Jakarta : BPS.
- BPS. (2009). *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*. Jakarta : BPS.
- BPS. (2009). *Laporan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/ Kota 2004-2008*. Medan : BPS Sumatera Utara.
- BPS, BAPPENAS, & UNDP. (2001). *Laporan Pembangunan Manusia 2001 Menuju Konsensus Baru : Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jakarta : BPS.
- BPS, BAPPENAS, & UNDP. (2004). *Laporan Pembangunan Manusia 2004. Ekonomi dan Demokrasi : Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta : BPS.